

Daftar Isi

Halaman Sampul	
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Grafik	xv
Intisari	xvi
Abstract	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengakan Hukum Lingkungan	23
B. Pengakan Hukum Lingkungan Melalui Sarana Administrasi	24
C. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Keperdataan	25
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa	25
2. Mekanisme Hukum Perdata	33
D. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sarana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Kepidanaan	37
E. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	45
1. Bentuk Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	46
2. Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi	47

3. Pendanaan Lingkungan Hidup	48
4. Insentif dan/atau Disinsentif	49
F. Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut	58
G. Undang-undang Perikanan&Sumber Daya Perikanan	59
H. Asas Pengelolaan Perikanan	62
I. Izin Usaha Perikanan (IUP)	62
J. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).....	66
K. Surat Penangkapan Ikan (SPI)	67
L. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).....	68
M. SATGAS 115 KKP	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	72
B. Jenis Penelitian.....	74
C. Analisis Data	78

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerugian Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang Diakibatkan oleh Pelanggaran dan Kejahatan di Sektor Kelautan dan Perikanan	79
1. Potensi Sumber Daya Ikan & PDB Perikanan Triwulan IV-2015.....	79
2. Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran di Sektor Kelautan dan Perikanan.....	83
3. Kejahatan dan Pelanggaran di Sektor Kelautan dan Perikanan	85
a. Kejahatan di Sektor Kelautan dan Perikanan: Kerugian Karena Pencemaran Laut di Laut Timor	85
b. Instrumen Pengendalian Pencemaran Lingkungan	92
c. Pencegahan Kepunahan Ikan	93
d. Penangkapan Kapal Asing	95
e. <i>Illegal Fishing</i> dan Keberhasilan Satgas KKP.....	99
f.. Kelebihan Tangkapan	103

B. Pengaturan Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Sektor Kelautan dan Perikanan.....	105
1. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Pendekatan Hukum Ekonomi	106
2. Perikanan Tangkap.....	110
3. Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia	111
4. Pengendalian Upaya Tangkap (<i>Input/Effort Control</i>).....	120
5. Pengendalian Hasil Tangkap (<i>Output/Cath Control</i>)	121
6. Pengendalian stok ikan yang tersisa (<i>Escapement Control</i>).....	122
7. Pemberian Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berupa Insentif di Sektor Kelautan dan Perikanan	123
8. Macam Pungutan Perikanan	126
9. Pungutan Perikanan	128
10. Fasilitas Pajak Penghasilan dari Pemerintah.....	129
a. Tax Allowance	129
b. Tax Holiday	130
11. Tarif Pajak Sebagai Alat Pendorong/Penghambat.....	130
12. Kriteria Pemberian Fasilitas Pajak di Sektor Kelautan dan Perikanan	132
13. Terobosan Kebijakan di Bisnis Perikanan dan Peluang Investasi	135
C. Implementasi Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup di Sektor Kelautan dan Perikanan bagi PT. Dwikarya Reksa Abadi Berbasis Sistem Insentif dan Disinsentif	153
1. Kronologis Singkat Tindakan Melawan Hukum oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi.....	153
2. Profil Singkat PT. Dwikarya Reksa Abadi	154
3. Objek Gugatan	157
a) Surat Keputusan Memenuhi Obyek PTUN	157
4. Akibat Dicabutnya SK KKP 18/2015	159
5. Alasan Hukum Pembatalan SK KKP 18/2015.....	161
a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	162

5. KKP 18/2015 Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	162
(1) Asas Kepastian Hukum	166
(2) Asas Larangan Mencampurkan Kewenangan	166
(3) Asas Kecermatan	166
(4) Asas Permainan yang Layak	167
(5) Asas Keadilan dan Kewajaran	168
(6) Asas Keterbukaan	168
6. Pokok Permintaan PT. Dwikarya dalam Gugatan	169
7. Jawaban KKP Terkait Gugatan PT. Dwikarya	169
a) Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	170
(1) Aspek Kewenangan	170
(2) Aspek Prosedur	172
(3) Aspek Substansi	174
8. Keputusan TUN dalam perkara <i>a quo</i> Tidak Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	182
a) Asas Kepastian Hukum	183
b) Asas Larangan Mencampurkan Kewenangan	183
c) Asas Kecermatan	183
d) Asas Permainan yang Layak	183
e) Asas Keadilan dan Kewajaran	184
f) Asas Keterbukaan	184
9. Pertimbangan Hakim dan Putusan	185
10. Penegakan Hukum Lingkungan	187
11. Mekanisme Hukum Administrasi	190
a) Penjatuhan Sanksi Administratif	190
12. Prinsip Pencemar Membayar (<i>Polluter Pays Principle</i>)	194
13. Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bagi PT. Dwikarya Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundangan Terkait Lainnya	200
a) Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bagi PT. Dwikarya Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	200

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	220
B. Saran	220

Daftar Pustaka

1 Tabel 1. Rumus Upaya Tangkap.....	116
2 Tabel 2. Contoh Kriteria Usaha yang Mendapatkan Fasilitas Pajak	132
3. Tabel 3. Implikasi Peraturan Terkait Insentif-Disinsentif di Sektor Kelautan dan Perikanan RI.....	142
4 .Tabel 4. Nama-nama Kapal PT. Dwikarya	142
5..Tabel 5. Tarif Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).....	142

Daftar Gambar

1 Gambar 1. PDB Perikanan Triwulan IV-2015.....	81
2 Gambar 2. Hewan Mati Karena Pencemaran di Laut Timor	87
3 Gambar 3. Kapal yang menumpahkan minyak di Laut Timor	87
4 Gambar 4. Eksploitasi Masif, Populasi Ikan Kritis	103
5 Gambar 4. Produksi Perikanan Triwulan IV-2015	112
6 Gambar 5. Terobosan Kebijakan Perikanan di Bisnis Perikanan	136
7 Gambar 6.. Peluang Emas Investasi Perikanan Indonesia	141

1 Grafik 1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2014-2015	121
2 Grafik 2. Target Ekspor Perikanan	137
3. Grafik 3. Produksi Ikan	137
4. Grafik 4. Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	137